



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR-RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**

Rapat Ke : 9
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, **24 Januari 2017**
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **Dr. M. Ali Taher, M. Hum.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA. 2016;
2. Isu-isu aktual.
Hadir : orang dari 47 orang Anggota Komisi VIII DPR-RI

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 251 ayat (2), Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.00 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk Umum.
2. Rapat Kerja dipimpin oleh Dr. M. Ali Taher, M.Hum., selaku Ketua Komisi VIII DPR RI sesuai acara tersebut diatas.

3. Rapat Kerja VIII DPR RI dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala BNPB dan tanggapan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas “**Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 dan Isu-isu aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2016 dari BNPB, namun perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut dengan pejabat eselon I
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan masukan dari anggota Komisi VIII DPR RI yaitu sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kajian risiko bencana dengan melakukan *update* data daerah rawan bencana secara berkala.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan penyelesaian masalah penempatan pengungsi Sinabung.
 - c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk pengurangan risiko bencana.
 - d. Melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan bencana yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan serta peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan bencana
 - e. Meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan BPBD terkait sosialisasi penggunaan dana tanggap darurat.
 - f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sector dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana
 - g. Perlunya menyiapkan kapal yang multi fungsi, yang diperuntukan untuk evakuasi, distribusi bantuan dan rumah sakit terapung terutama untuk wilayah kepulauan

Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat kerja bersama Kementerian Sosial RI dan BNPB terkait pembahasan masalah kebencanaan.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

Jakarta, 24 Januari 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

Ttd.

Dr. H. M. ALI TAHER, SH., M.Hum.